

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Organisasi Non Profit

2.1.1.1 Pengertian Organisasi Non Profit

Organisasi non profit adalah suatu organisasi untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute, riset, museum, dan beberapa petugas pemerintah.

Menurut Korompis (2014) dalam Ika Kristiani (2022) pengertian organisasi non profit adalah sebagai berikut:

“Organisasi nirlaba adalah suatu lembaga yang didirikan dengan tujuan tidak semata-mata untuk mendapatkan profit, tetapi bermaksud untuk mendukung suatu isu atau peristiwa yang berkaitan dengan kemasyarakatan untuk menarik perhatian masyarakat, tanpa adanya tujuan komersil”

Sedangkan menurut IAI (2020) dalam Ika Kristiani (2022) pengertian organisasi non profit adalah sebagai berikut :

“Organisasi nirlaba adalah suatu entitas yang mendapatkan sumber daya untuk kegiatan operasionalnya berasal dari donasi anggota dan

penyumbang, tanpa mengharapkan pengembalian apapun dari entitas”

Menurut Sujarweni (2015) dalam RP Sentosa (2020) pengertian organisasi non profit adalah:

“Organisasi nirlaba adalah organisasi yang dimiliki pemerintah maupun dimiliki oleh sektor swasta yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi nirlaba meliputi; Gereja, Yayasan, Sekolah, Rumah Sakit dan Klinik Publik, keberhasilan suatu organisasi nirlaba tidak terukur dari keuntungan secara materi, tetapi berdasarkan pencapaian pelayanan sosial.”

Sedangkan menurut (Nuraisyah & Wardoyo, 2019) dalam Rizki Riswanda, Angelia Putri Tampubolon, Nurul Aulia Rachmawati & Naada Thoi’ah (2023) pengertian organisasi non profit adalah sebagai berikut:

“Organisasi nirlaba adalah jenis entitas yang bisa dimiliki oleh sektor swasta maupun pemerintahan. Fokus utama organisasi nirlaba bukan semata-mata untuk mencari keuntungan finansial saja”.

Dari uraian di atas dapat diinteprestasikan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk kepentingan umum guna mensejahterkan masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh laba.

2.1.1.2 Ciri-ciri Organisasi Non Profit

Organisasi non profit mempunyai misi melayani publik dan konsumennya lebih terbatas sedangkan organisasi profit mempunyai motif untuk mencari untung, yaitu hanya melayani konsumen yang dapat memberikan keuntungan. Apabila dari suatu kelompok konsumen tidak akan diperoleh keuntungan maka organisasi bisnis umumnya tidak bersedia melayani (Salusu, 2010:47) dalam (IDG Mahardika 2023).

Adapun ciri-ciri organisasi non profit adalah sebagai berikut :

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.
4. Menurut PSAK No 45 (2009: 45.2) dalam (EH Lelo,2018) Karakteristik organisasi nirlaba dalam menjalankan operasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap struktur, visi serta misi dari organisasi nirlaba. Dalam ruang lingkup, dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus harus memenuhi karakteristik
5. Sumber daya entitas berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

6. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas itu.
7. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

2.1.1.3 Contoh Organisasi Non Profit

Menurut Mardiasmo (2015) dalam Reza Muhammad Rizqi & Nurfadliyah Nurfadliyah (2020) organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan.

Sedangkan menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 45) dalam Reza Muhammad Rizqi & Nurfadliyah Nurfadliyah (2020) bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (IAI, 2011:45.1).

Berikut adalah contoh-contoh organisasi non profit yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Yayasan

Contoh organisasi non profit yang pertama adalah yayasan. Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah UU No

28 Tahun 2004. Undang-undang tersebut mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya, organisasi ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, atau bidang kemanusiaan lainnya yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemilikannya yang eksklusif. Organisasi ini hanya memiliki pendiri dan warga Negara asing dapat membangun yayasan atas kepemilikannya sendiri. Hal tersebut dilihat dari susunan strukturnya yang terdiri dari dewan pengawas, dewan penasehat dan dewan pengurus. Dewan pengawalan yang berhak untuk memberikan keputusan terhadap dewan penasihat dan pengurus.

2. Lembaga Gabungan (Asosiasi)

Contoh organisasi non profit yang kedua adalah lembaga gabungan atau asosiasi. Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada diantara para anggotanya yang tergabung. Asosiasi dibedakan menjadi dua yaitu asosiasi gabungan dengan memiliki hukum dan asosiasi biasa yang tidak memiliki hukum. Jika ada lembaga asosiasi yang ingin mendapatkan perlindungan hukum, lembaga tersebut harus mempersiapkan surat pendaftaran.

Surat pendaftaran ini nantinya akan diajukan ke ketua pengadilan negeri. Setelah surat pendaftarannya disetujui dan disahkan oleh pengadilan distrik, maka akan keluar surat perlindungan hukum dari

Departemen Hukum dan HAM.

3. Institut

Contoh organisasi non profit yang terakhir adalah institut. Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh institusi adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lembaga kursus belajar, institute pelatihan kerja dan sebagainya.

Dari ketiga contoh lembaga organisasi nirlaba dapat disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya didirikannya organisasi nirlaba adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari bentuk penyajian organisasinya yang membantu dalam melayani masyarakat, mencerdaskan anak bangsa dan memberikan kebebasan bagi masyarakat.

2.1.1.4 Tujuan Organisasi Non Profit

Organisasi nirlaba dibentuk dengan tujuan utama mendukung atau terlibat aktif dalam berbagai aktivitas publik tanpa berorientasi mencari keuntungan (Mandiri, 2012).

Organisasi nirlaba baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Non-Governmental Organization (NGO) dibentuk dengan tujuan meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Organisasi ini dibentuk oleh sekumpulan warga masyarakat

berdasarkan nilai-nilai sosial yang hidup di dalam masyarakat, serta didukung oleh adanya kepedulian terhadap nasib sesama manusia baik dalam bidang sosial, politik, budaya, pendidikan dan kesehatan. Organisasi nirlaba menjadi ujung tombak perubahan sosial, melalui perubahan dari kepentingan pribadi menjadi kepentingan publik (Harmuningsih, 2017).

Adanya organisasi nirlaba sangat berdampak dalam perubahan sosial masyarakat, hal ini disebabkan karena semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap sesama. Kepedulian masyarakat dengan saling membantu satu sama lain akan menimbulkan perubahan sosial kearah yang lebih baik.

2.1.2 Pengendalian Intenal

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:221) dalam Hani Fitria Rahmani dan Nenisa Rahayu (2022) ,

“Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, menjaga kekayaan, dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektifitas dan efeisiensi operasi”

Pengendalian internal merupakan proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah dipenuhi (Romney, 2014: 226) dalam M Eprilia (2018).

Menurut Kumaat (2015) dalam A Nainggolan (2018), pengendalian adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya atau organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud), dan melindungi sumber daya organisasi baik yang

berwujud maupun tidak berwujud seperti (reputasi, hak kekayaan intelektual dagang).

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli di atas maka dapat diinterpretasikan, bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam organisasi perusahaan maupun organisasi not profit.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Mulyadi (2014:163) tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah:

1. Menjaga Kekayaan Organisasi

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan

keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3. Mendorong efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Menurut Arens (2015) dalam Maria Magdalena Pur Dwiastuti, Wendri Sukmarani, Untara, & Yudi Irawan Chandra (2023), tujuan pengendalian internal ada tiga, yaitu :

1. Keandalan laporan keuangan Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti *General Accepted Accounting Prinsiple (GAAP)*.

2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Perusahaan publik, perusahaan non publik, maupun organisasi nirlaba di haruskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan.

Penerapan sistem pengendalian internal yang baik menunjang keberhasilan organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan dapat mencerminkan praktik manajerial yang baik pula.

Dari praktik manajerial yang baik ini akan menimbulkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi, dengan demikian sistem pengendalian internal memang sangat diperlukan untuk semua organisasi baik yang bisnis maupun nirlaba.

2.1.2.3 Unsur-unsur dan Komponen Pengendalian Internal

2.1.2.3.1 Unsur-unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok sistem pengendalian internal ada 4 unsur, yaitu :

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

- b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
- c. Praktik yang sehat. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan

2.1.2.3.2 Komponen Pengendalian Internal

Berdasarkan rumusan *COSO(2013)* dalam Ibnu Fajar & Oman Rusmana (2020) bahwa sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian

dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari lima komponen yaitu :

- a. Integritas dan nilai etika organisasi.
- b. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya.
- c. Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- d. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.
- e. Ketegasan mengenai tolok ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja.

Selanjutnya, COSO (2013:7) dalam Ibnu Fajar & Oman Rusmana (2020) menyatakan, bahwa terdapat lima prinsip yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian, yaitu :

- a. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
- b. Dewan direksi menunjukkan kemandirian dari manajemen dan

latihan yang mengawasi perkembangan dan kinerja pengendalian internal.

- c. Manajemen menetapkan, dengan pengawasan dewan, struktur, jalur pelaporan, dan otoritas dan tanggung jawab yang tepat dalam mengejar tujuan.
- d. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan.
- e. Organisasi meminta pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

2. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian (*control activities*). Kegiatan pengendalian adalah arahan manajemen untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan dengan tindakan yang dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Aktivitas kontrol dilakukan di semua tingkat entitas, di berbagai tahapan dalam proses bisnis, dan di atas lingkungan teknologi.

Menegaskan mengenai tiga prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian yaitu :

- a. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat yang dapat diterima.

- b. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
- c. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

3. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko (*risk assessment*) adalah peristiwa atau kejadian yang mungkin ada dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Penilaian risiko melibatkan proses dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. menjelaskan mengenai empat prinsip yang mendukung penilaian risiko yaitu :

- a. Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.
- b. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuannya di seluruh entitas dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Organisasi mempertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan.
- d. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang

dapat berdampak signifikan pada sistem pengendalian internal.

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuannya.

Selanjutnya menegaskan mengenai tiga prinsip dalam organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu :

- a. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- b. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
- c. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Aktivitas pemantauan (*monitoring activities*) dalam pengendalian internal yaitu evaluasi yang sedang berlangsung, evaluasi terpisah, atau beberapa kombinasi dari keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal, termasuk kontrol untuk mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, hadir dan berfungsi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.

2.1.2.4 Jenis-jenis Pengendalian Internal

Jenis pengendalian internal ini dibagi menjadi dua yaitu, pengendalian internal akuntansi, dan pengendalian internal administrasi.

1) Pengendalian Internal Akuntansi

Yang dikendalikan dalam pengendalian internal akuntansi ini meliputi, keandalan data, persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan, pengawasan, serta pengawasan aset perusahaan.

2) Pengendalian Administrasi

Dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal meliputi, efisiensi usaha, analisis risiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu.

2.1.2.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pengendalian intern yang memadai tidak selalu menjamin sepenuhnya bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai karena pengendalian intern memiliki keterbatasan yang melemahkan pengendalian intern tersebut. Keterbatasan pengendalian intern menurut (Mulyadi 2016) dalam C Buhana (2021) adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan.

Seringkali manajemen dan personel lainnya salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melakukan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya.

2. Gangguan.

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi.

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidak berasan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh struktur pengendalian intern yang

dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen.

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah. Seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu.

5. Biaya lawan manfaat.

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan struktur pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut, karena pengaturan secara tepat baik biaya maupun manfaat biayanya tidak mungkin dilakukan. Manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi biaya dan manfaat suatu struktur pengendalian intern.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keterbatasan pengendalian intern adalah hal-hal yang menjadi sebab tidak tercapainya pengendalian intern seperti yang direncanakan. Jadi penerapan pengendalian intern bukan dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan akan terjadinya hal-hal tersebut seminimal mungkin dan walaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diatasi.

2.1.3 Dewan Pengawas

2.1.3.1 Pengertian Dewan Pengawas

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pentingnya pengawasan diharapkan dapat memotivasi kinerja karyawan agar karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik.

Menurut Daulay (2017: 218) dalam S Nugroho (2021) menambahkan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Sedangkan menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 mengenai definisi dewan pengawas adalah :

“Dewan Pengawas BLU, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU”.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) dalam S Nugroho (2021) secara umum pengertian pengawasan adalah sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi isi suatu organisasi.

2.1.3.2 Tujuan Dewan Pengawas

Pengawasan tidak akan tercapai bila tidak ada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Tujuan pengawasan menurut Adisasmita (2011:45) dalam Yusi Nurdianti (2019) adalah sebagai berikut :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Kadarisman (2015: 173) dalam S Nugroho (2021) bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2.1.3.3 Tugas Dewan Pengawas

Agar terwujudnya organisasi yang lebih baik, dalam pengawasannya Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab dan tugas yang harus dipenuhi. Tanggung jawab Dewan Pengawas dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercantum pada terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko, tercapainya imbal hasil (*return*) yang

optimal bagi pemegang saham, terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar, terlaksanakannya kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi (Zarkasyi, 2008:95).

2.1.3.4 Pentingnya Dewan Pengawas

Alasan penting dalam pengembangan dan penerapan sistem pengawasan adalah karena orang-orang sering melakukan kesalahan. Sehingga dirancang sistem pengawasan secara efektif akan mampu mendeteksi peramalan dan keputusan yang salah, sehingga kerugian dapat diminimisasi (Rahayu Relawati (2012 : 108).

Menurut Rahayu Relawati (2012 : 108), setidaknya ada delapan kegunaan dewan pengawas yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Untuk standarisasi pelaksanaan kegiatan. Yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam organisasi.
2. Untuk mengamankan aset perusahaan atau organisasi. Dapat mengurangi kerugian karena pencurian, pemborosan dan penyalahgunaan pada organisasi.
3. Untuk standarisasi mutu. Yaitu diperlukan sebagai spesifikasi organisasi atau harapan dari pelanggan.
4. Untuk membatasi kekuasaan. Dimaksud untuk menentukan pertanggungjawaban dan menyediakan keperluan pendelegasian wewenang, disini juga harus menetapkan parameter dimana kekuasaan yang didelegasikan dapat dijalankan tanpa persetujuan ketat.

5. Untuk mengukur pelaksanaan tugas. Dimaksud agar mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Sebagai monitor pelaksanaan pelaksana. Adalah dasar dari pencapaian tujuan organisasi.
7. Untuk memungkinkan manajemen puncak menjaga keseimbangan rencana dan program perusahaan atau organisasi.
8. Untuk motivasi individu-individu. Adalah untuk pengukuran pelaksanaan dan keterkaitan dengan insentif finansial serta penghargaan individu.

2.1.4 Transparansi Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Transparansi Keuangan

Dalam jurnal Rafiansyah et al., (2022) dijelaskan bahwa pengungkapan atau keterbukaan keuangan dapat di artikan suatu kondisi dimana informasi keuangan yang disajikan dapat diakses dengan mudah dan transparan.

Di samping itu Urip Wardoyo et al (2023) menjelaskan transparansi sebagai salah satu tanggung jawab organisasi nirlaba terhadap pemangku kepentingan, antara lain anggota organisasi, pendukung, penerima manfaat, relawan, anggota, organisasi koperasi dan lain-lain.

Menurut (Atmaja,dkk 2013:19 dalam MK Surjadjaja 2019) pengertian tranparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan”.

Aspek keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas organisasi nirlaba atas kinerja organisasi. Dengan demikian, laporan keuangan organisasi nirlaba dan kesesuaiannya dengan fakta merupakan bukti bahwa operasi organisasi tersebut konsisten dengan misi yang diembannya.

Oleh karena itu, adanya transparansi dan keterbukaan memegang peranan yang penting dalam organisasi nirlaba karena memiliki dampak untuk :

- a. Membangun kepercayaan publik, dengan menjadi transparan, organisasi nirlaba dapat membangun hubungan yang jujur dan terpercaya dengan publik, pendukung, dan donatur mereka.
- b. Menunjukkan akuntabilitas dan integritas, transparansi menghasilkan akuntabilitas, memastikan bahwa organisasi nirlaba bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang mereka terima. Hal ini juga memperkuat integritas organisasi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana.
- c. Menarik donatur dan pendukung, organisasi nirlaba yang transparan dan memiliki keterbukaan keuangan yang baik akan menarik lebih banyak donatur dan pendukung potensial. Donatur cenderung memberikan dukungan kepada organisasi yang mereka percaya dan yang memberikan bukti nyata tentang dampak positif yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.
- d. Mempertahankan kepercayaan dan dukungan. Transparansi yang konsisten membantu organisasi nirlaba untuk mempertahankan kepercayaan publik dan mendapatkan dukungan berkelanjutan.

Kepercayaan dan dukungan ini penting untuk kesinambungan organisasi dan kemampuannya dalam mencapai tujuan sosialnya.

Dari penjelasan pengertian di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa transparansi keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah organisasi non profit.

2.1.4.1 Manfaat Transparansi Keuangan

Menurut Medina (2012) dalam <https://www.kajianpustaka.com/>, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan, yaitu:

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan berlaku lebih bertanggung jawab jika keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka atau transparan untuk publik dan dapat mencegah adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan

mendukung kebijakan tersebut.

4. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat, misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan mendukung kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Sri Minarti dalam Fierda (2015:29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat 5 dan memadai.

2.1.4.2 Prinsip Transparansi Keuangan

Menurut Abdillah & Suprihatin (2020) dalam R Riswanda (2023) prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti :

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan, penyebaran informasi, ataupun penyimpangan tindakan aparat publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami, adanya publikasi mengenai detail penggunaan Dana , adanya laporan-laporan keuangan dan pertanggung jawaban di dalam pengelolaanya.

2.1.4.3 Karakteristik Transparansi Keuangan

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2018:19) dalam L Palindri (2021) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Informatif.

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

b. Keterbukaan.

Keterbukaan informasi publik memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

c. Pengungkapan.

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Keuangan pada Organisasi Non Profit

Penerapan pengendalian internal dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan di dalam organisasi non profit

Menurut Sari (2017) pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi keuangan sebagai berikut:

“Penerapan sistem pengendalian internal yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip transparansi keuangan”

Menurut Dewi (2017) dalam Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017)

pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi keuangan sebagai berikut:

”Sistem pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Jika pengendalian internal suatu organisasi non profit lemah, Maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan transparansi keuangan dapat diperkecil”

Menurut Risnayanti (2020) pengaruh pengendalian internal terhadap

transparansi keuangan sebagai berikut:

“Hubungan antara pengendalian internal dan transparansi keuangan terletak pada cara keduanya mendukung tata kelola yang baik. Pengendalian internal berfokus pada perlindungan aset, akurasi, data, dan kepatuhan terhadap kebijakan internal, yang membantu memastikan integritas dan efisiensi organisasi. Sementara itu transparansi memastikan bahwa informasi tentang kebijakan, proses dan hasil dapat diakses publik, dan mendukung kepercayaan terhadap organisasi, maka dapat disimpulkan keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya”.

Dari uraian di atas penulis dapat menginterpretasikan bahwa, jika semakin baik pengendalian internal suatu organisasi, maka transparansi keuangan dalam organisasi tersebut juga akan semakin meningkat, karena mekanisme pengawasan dalam pengendalian internal berguna untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan transparan, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan para stakeholder.

2.2.2 Pengaruh Dewan Pengawas terhadap Transparansi Keuangan pada Organisasi Non Profit

Menurut Rai (2008) dalam B Jatmiko 2020 Pengaruh Dewan Pengawas Transparansi Keuangan sebagai berikut:

” Dewan pengawasan merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaran. Dewan pengawasan ini diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, Dewan pengawasan juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Maka pada dasarnya Dewan pengawasan merupakan tindakan yang bersifat aktif, karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan.”

Dalam peraturan menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015, Dewan pengawas harus memiliki persyaratan baik formal maupun materil yang terdiri dari:

- Formal
 1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit
 3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pegawai yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit
- Materil/Material :
 - a. Integritas
 - b. Dedikasi
 - c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan

yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

Menurut Syncore (2023) Pengaruh Dewan Pengawas terhadap Transparansi Keuangan sebagai berikut:

“Dewan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan transparansi keuangan dalam berbagai konteks, terutama dalam lembaga-lembaga pemerintahan. Berikut adalah beberapa peran dewan pengawas dalam mempromosikan transparansi keuangan”:

1. Mengawasi Pengelolaan Dana: Dewan pengawas memastikan pengelolaan aset dan dana dilakukan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kecurangan, mereka memeriksa laporan keuangan, audit internal, dan memantau penggunaan dana.
2. Evaluasi Tujuan dan Indikator Kinerja: Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memantau kinerja operasional, yang mencakup aspek pelayanan, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemantauan ini membantu memberikan saran perbaikan dan memastikan bahwa organisasi mencapai hasil yang optimal.
3. Mengidentifikasi dan Mengelola Risiko: Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga. Aspek keuangan, operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan adalah bagian dari ini. Mereka bekerja sama dengan manajemen untuk membuat kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk pengendalian risiko.

4. Mengawasi Kepatuhan Etika dan Tata Kelola: Tugas dewan pengawas adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip etika dan tata kelola diterapkan dengan baik. Dewan pengawas memantau kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan. Hal ini meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam operasi organisasi.
5. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan: Untuk memastikan proses pengawasan transparan dan memberikan informasi yang akurat kepada pihak terkait, dewan pengawas memberikan laporan hasil pengawasan dan saran kepada pihak terkait.

Dalam keseluruhan, dewan pengawas berperan sebagai jembatan antara lembaga dan pihak eksternal, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas operasional lembaga. Dewan pengawas pada organisasi non profit dapat berpengaruh terhadap transparansi keuangan karena dalam tugasnya dewan pengawas dapat menjadi pendukung agar dapat tercapainya tujuan dan visi misi di suatu organisasi dan juga dapat memberikan keamanan dalam menjalankan suatu organisasi agar tetap terjaga dan mencegah terjadinya resiko-resiko kecurangan yang terjadi di masa yang akan datang.

2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian internal dan peran dewan pengawas terhadap transparansi keuangan pada organisasi non profit adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sari Embun Widya (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada transparansi dan akuntabilitas
2	Yuliani Nur Laila (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas dan pengendalian internal berpengaruh positif pada transparansi laporan keuangan
3	Susilo Arief, Suparno (2023)	Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Aceh	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah
4	Amelia Rossa (2015)	Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, Tekanan Eksternal dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Pekanbaru)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal, akuntabilitas, tekanan eksternal dan komitmen pimpinan berpengaruh positif pada transparansi pelaporan keuangan
5	Jatmiko, B. (2020).	Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan pengawasan intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang

		Kabupaten Sleman	untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Dewan pengawasan internal ini diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana.
6	Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017).	Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas dan Asimetri Informasi pada Kecurangan Akuntansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Jika pengendalian internal suatu organisasi non profit lemah, Maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar.
7	M Risnayanti (2020)	Pengaruh Pengendalian Internal dan Transparansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan transparansi keuangan memegang peran penting untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada organisasi dan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka.

Tabel 2. 2
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

Peneliti	Tahun	Pengendalian Internal	Akuntabilitas	Transparansi	Aksesibilitas	Peran Dewan Pengawas
Sari Embun Widya	(2017)	✓	✓	✓	✓	-
Yuliani Nur Laila	(2017)	✓	-	✓	✓	-
Susilo Arief, Suparno	(2023)	✓	-	-	✓	-
Amelia Rossa	(2015)	✓	✓	✓	-	-
Lestari ,N.K & Supadmi ,N .L	(2017)	✓	-	-	-	-
Jatmiko B	(2020)	-	✓	✓	-	✓
M Risnayanti	(2020)	✓	-	✓	-	-
Bagus Tiang Panningih	(2023)	✓	-	✓	-	✓

Keterangan: Tanda ✓ = Diteliti

Tanda - = Tidak Diteliti

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu di atas. Terdapat persamaan dari setiap variabel-variabel yang diteliti oleh penulis dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun persamaan variabel Pengendalian Internal, Peran Dewan Pengawas, dan Transparansi Keuangan dengan penelitian, Sari Embun Widya (2017), Yuliani Nur Laila (2017), Susilo Arief, Suparno (2023), Amelia Rossa (2015) dan Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017). Jatmiko B (2020)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian diatas tersebut dengan judul, Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengaruh akuntabilitas keuangan, pengawasan, keuangan daerah, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pemerintah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitiann yang direplikasikan adalah variabel dan tahun penelitian. Pada penelitian Sari Embun Widya variabel independen yang di gunakan adalah Pengendalian Internal, Akuntabilitas. Transparansi dan Aksesibilitas sedangkan penulis menggunakan variabel

independen yang terdiri dari Pengendalian Internal, Peran Dewan Pengawas dan Transaparansi Keuangan.

Pada penelitian Yuliani Nur Laila terdapat perbedaan pada variabel. Pada penelitian Yuliani Nur Laila variabel independen yang digunakan adalah Pengendalian Internal, Aksesibilitas, Transparansi Keuangan sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari Pengendalian Internal, Peran Dewan Pengawas dan Transparansi Keuangan.

Pada penelitian Susilo Arief, Suparno variabel independen yang digunakan yaitu hanya Pengendalian Internal dan Aksesibilitas saja sedangkan penulis menggunakan variabel independen Pengendalian Internal. Peran Dewan Pengawas, dan Transparansi.

Pada penelitian Amelia Rossa terdapat perbedaan pada variabel dan tahun penelitian. Pada peneltian Amelia Rossa menggunakan variabel independen yaitu Akuntabilitas, Transparansi Keuangan dan Pengendalian Internal sedangkan penulis menggunakan variabel independen Pengendalian Internal, Peran Dewan Pengawas, dan Transparansi dan yang terakhir terdapat perbedaan tahun penelitian Amelia Rossa pada tahun 2015 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.

Pada penelitian Jatmiko B terdapat perbedaan pada variabel dan tahun penilitian. Pada penelitian Jatmiko B menggunakan variabel Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi dan sedangkan penulis menggunakan variabel Pengendalian Internal, Peran Dewan Pengawas dan Transparansi.

Pada Penelitian Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. Terdapat perbedaan

pada variabel. Pada penelitian Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. Variabel independen yang digunakan adalah, Pengendalian internal, Integritas dan Asimetri informasi sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari Pengendalian Internal, Peran Dewan Pengawas, dan Transparansi Keuangan.

Pada penelitian M Risnayanti terdapat perbedaan pada variabel. Pada penelitian M Risnayanti variabel independen yang digunakan adalah, Pengendalian Internal, Transparansi Keuangan dan Laporan Keuangan, sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari, Pengendalian Internal, Peran Dewan Pengawas, dan Transparansi Keuangan.

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran

Landasan Teori		
Pengendalian Internal	Peran Dewan Pengawas	Transparansi Keuangan
1. Mulyadi (2017:129) 2. Jason Scott (2014:226) 3. IAPI (2011:319.2) 4. Mulyadi (2010:163) 5. Mulyadi (2017:130) 6. V.Wiratna Sujarweni (2015:71)	1. Terry (Bangun,2008:164) 2. Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 3. Adisasmita (2011:45) 4. Suhendi (2010) 5. Zarkasyi (2008:95) 6. Rahayu Relawati (2012 : 108).	1. Rusdiana dan Nasihudin (2018: 25). 2. Mahmudi (2011: 17). 3. Sari (2017) 4. Medina (2012) 5. Sri Minarti dalam Fierda (2015:29) 6. Humanitarian Forum Indonesia (HFI) 7. Abdillah & Suprihatin, 2020) 8. Mardiasmo,2009

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian merupakan jawaban yang bersifat sementara atas suatu penelitian yang harus dibuktikan dengan penelitian atas fakta yang diperoleh.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, hipotesis yang merupakan simpulan sementara dari penelitian ini yaitu:

H1: Pelaksanaan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Transparansi Keuangan pada Organisasi Non Profit.

H2: Peran Dewan Pengawas berpengaruh terhadap Transparansi Keuangan pada Organisasi Non Profit.

H3: Pengaruh Pengendalian Internal dan Peran Dewan Pengawas Berpengaruh terhadap Transparansi Keuangan pada Organisasi Non Profit